

Analisis Peran Dan Fungsi Komisi C Dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara

Nadia Aprilia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : aprilianadia1904@gmail.com

Muhammad Irwan Padli Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : irwannst@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis : aprilianadia1904@gmail.com

Abstract. *In the planning and management of the budget for working visits, Commission C of the North Sumatra Provincial DPRD plays a crucial role. Through qualitative research methods with a descriptive approach and direct observation at the North Sumatra Provincial DPRD for one month, the research findings revealed that Commission C is involved in processes including the preparation, implementation, and distribution of official notes, as well as the printing of documents such as SPT and SPPD for the execution of working visits. Additionally, Commission C also performs legislative, oversight, budgeting, and coordination functions to ensure the efficiency and transparency of fund utilization and compliance with applicable regulations. These findings highlight the significance of the role of Commission C in representing and serving the interests of the North Sumatra community effectively.*

Keywords: *Role, Function, Commission C, Working Visit, DPRD*

Abstrak. Dalam merencanakan dan mengelola dana anggaran untuk kunjungan kerja, Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara memainkan peran yang penting. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan observasi yang langsung di DPRD Provinsi Sumatera Utara selama satu bulan lamanya, hasil penelitian ini mengungkap bahwa Komisi C terlibat dalam proses yang meliputi penyusunan, permohonan, dan distribusi nota dinas, serta pencetakan dokumen seperti SPT dan SPPD untuk pelaksanaan kunjungan kerja. Di samping itu, Komisi C juga melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan koordinasi guna memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan dana serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan peran yang signifikan dari Komisi C dalam mewakili dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat Sumatera Utara dengan efektif.

Kata Kunci : Peran, Fungsi, Komisi C, Kunjungan Kerja, DPRD

LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu lembaga yang menjadi perwakilan rakyat daerah yang memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah (Ayu & Nurjaman, 2022). Komisi di dalam dewan perwakilan rakyat merupakan badan pendukung permanen yang terbentuk sejak awal masa jabatan anggota DPRD (Saputra, 2019). Tugas utama komisi ini mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Setiap komisi memiliki tanggung jawab khusus di berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.

Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota komisi itu sendiri. Mereka berperan penting dalam menyusun peraturan daerah (Ranperda) dan berpartisipasi dalam pembahasan anggaran, termasuk alokasi dana untuk kunjungan kerja dan kegiatan lain yang relevan. Komisi juga bertanggung jawab untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan efisien, sesuai dengan harapan masyarakat dan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Secara keseluruhan, keberadaan komisi di DPRD mencerminkan prinsip demokrasi yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat mewakili aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan daerah, memiliki beberapa komisi yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi penting dalam proses pengambilan keputusan legislatif dan pengawasan. Salah satu komisi yang memiliki peran sentral dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja adalah Komisi C.

Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara memainkan peran krusial dalam merumuskan dan menyusun dana anggaran yang berkaitan dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, legislasi, serta pencermatan terhadap berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi.

Dalam konteks penyusunan dana anggaran kunjungan kerja, Komisi C memiliki tanggung jawab yang luas, meliputi berbagai aspek penting, mulai dari estimasi biaya hingga pengawasan pengeluaran. Analisis mendalam mengenai peran dan fungsi Komisi C menjadi relevan, mengingat pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin tercapainya tujuan kunjungan kerja yang ditetapkan.

Pada penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif peran dan fungsi Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja, serta bagaimana mereka berperan sebagai pengawas anggaran yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kunjungan kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kontribusi Komisi C dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk kepentingan pembangunan daerah.

KAJIAN TEORITIS

Peran dan Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan serangkaian perilaku yang dimiliki seseorang yang mempunyai kedudukan di lingkungan masyarakat, peran juga dapat diartikan sebagai perilaku / tindakan seseorang yang memiliki kedudukan yang menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya (Ali & Murdiana, 2020). Peran menggambarkan fungsi atau posisi yang dijalankan oleh individu atau entitas dalam suatu konteks tertentu. Dalam masyarakat, peran sering menetapkan harapan dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu.

Sedangkan fungsi merujuk pada tugas atau aktivitas spesifik yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi juga dapat mencakup cara suatu objek atau sistem bekerja untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu.

Dalam konteks organisasi atau bisnis, peran dan fungsi sering saling terkait. Setiap individu atau departemen memiliki peran dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi yang diharapkan dari mereka untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Di dalam masyarakat, peran dan fungsi juga menentukan interaksi antara individu dalam berbagai lingkungan dan komunitas.

Dana Anggaran

UP atau Uang Persediaan adalah sejumlah uang awal yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mendukung kegiatan operasional atau pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung. UP diberikan sekali pada awal tahun laporan, dan nilainya dapat dihitung berdasarkan persentase dari total anggaran belanja dalam DPA-SKPD. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan unit kerja memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari dan mengurangi risiko keterlambatan pendanaan (Kamal et al., 2023). Menurut Don R. Hansen dan M. Mowen Maryanne Anggaran merupakan sebuah bagian kunci dalam merencanakan keuangan masa depan, yang terdapat identifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan dalam mencapainya. (Zaenudinsyah, 2016)

Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja merujuk pada kunjungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat kerja, pabrik, organisasi, atau institusi lainnya untuk tujuan tertentu terkait dengan kegiatan kerja atau pembelajaran. Dalam bisnis, kunjungan semacam itu umumnya dilakukan untuk tujuan studi lapangan, observasi langsung, atau pertukaran pengetahuan antara perusahaan atau industri yang berbeda. Di bidang pendidikan, kunjungan kerja sering

dilakukan oleh siswa atau mahasiswa guna memperluas pemahaman mereka tentang praktik bisnis atau industri tertentu. Tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang pelaksanaan kegiatan bisnis di lapangan, sehingga mereka dapat menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik di dunia nyata.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa dalam situasi yang bersifat alami, dengan peneliti berperan sebagai perangkat utama (Hidayat, 2012). Menurut Koentjaraningrat (1993) penelitian kualitatif merupakan sebuah desain yang desainnya memiliki tiga format. Ketiga format ini adalah penelitian deskriptif, verifikasi dan grounded research (Salmaa, 2023). Penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, mendalam, dan komprehensif terhadap subjek atau objek yang sedang diteliti. Metode ini sering digunakan untuk memahami serta menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan (Gumilang, 2021).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dalam mengumpulkan data. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi pada kantor Dprd Provsu selama kurang lebih satu bulan lamanya yang dilakukan pada tanggal 16 januari sampai dengan 16 febuari 2023 dalam rangka magang/ praktek kerja lapangan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti menemukan sebuah masalah yang dapat peneliti teliti, yaitu adalah peran dan fungsis komisi c dalam menyusun dana anggaran komisi c dprd provsu. Pada penelitian ini peneliti akan membahas terkait peran dan fungsi komisi c serta bagaimana proses atau tahapan dalam merencanakan dan pengajuan dana anggaran agar dapat di setujui oleh dprd provsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan observasi pada komisi c dprd provsu dalam rangka Praktek kerja (magang) selama 1bulan lamanya yaitu pada tanggal 16 januari-16 febuari. Peneliti menilai bahwa pegawai/staff komisi c memiliki peran dan fungsi dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja.

Untuk dapat melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota (dewan) komisi c staff komisi C harusla menyusun dan merencanakan dana anggaran. Dalam penyusunan dana anggaran kunjungan kerja yang akan di lakukan komisi c ada beberapa

tahap untuk mengajukan dana anggaran sehingga anggaran tersebut dapat disetujui yaitu (Kamal et al., 2023):

1. Penyusunan Nota Dinas

Tahap pertama adalah menyusun Nota Dinas yang berisi rincian rencana kunjungan kerja. Dalam Nota Dinas ini, perlu mencantumkan tujuan kunjungan, anggaran yang dibutuhkan, serta rencana kegiatan selama kunjungan.

2. Permohonan Nomor Nota Dinas

Setelah Nota Dinas disiapkan, langkah berikutnya adalah meminta nomor Nota Dinas kepada pihak yang berwenang. Nomor Nota Dinas adalah identifikasi resmi untuk setiap pengajuan anggaran, dan setiap pengajuan harus memiliki nomor unik.

3. Distribusi Nota Dinas

Nota Dinas yang sudah diberi nomor kemudian akan dibagikan kepada pihak-pihak terkait, seperti bagian administrasi, keuangan, dan anggota Komisi C. Nota Dinas yang telah memiliki nomor administrasi dapat diterima oleh pihak-pihak terkait.

4. Pencetakan SPT dan SPPD

Setelah Nota Dinas mendapatkan persetujuan dan nomor administrasi, bagian keuangan akan mencetak Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). SPT dan SPPD ini akan digunakan sebagai panduan selama pelaksanaan kunjungan kerja.

5. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Tahapan terakhir adalah melaksanakan kunjungan kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun. SPT dan SPPD akan menjadi panduan untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh anggota Komisi C.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, Komisi C dapat merencanakan dan mengajukan anggaran kunjungan kerja secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini akan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan menjalani proses yang transparan dalam mendukung kegiatan kunjungan kerja yang akan berlangsung.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang memiliki banyak tugas dan fungsi, termasuk dalam hal perumusan dan pengawasan anggaran. Salah satu komisi di DPRD yang memiliki peran penting dalam penyusunan dana anggaran kunjungan kerja adalah Komisi C. Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk sejumlah aspek, termasuk penganggaran

untuk kegiatan kunjungan kerja. Dalam makalah ini, akan dianalisis peran dan fungsi Komisi C dalam penyusunan dana anggaran kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Pada hasil diatas peneliti mengentahui bahwa komisi c memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam meerenakan dan menyusun dana anggaran untuk perjalanan dinas. Tanpa perencanaan dan penyusunan dana anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja tidak akan dapat disetujui. Hal ini dikarenakan proses atau tahapan dalam penyusunan harusla melalui persetujuan dari pihak berwenang yang dapat mengeluarkan dana anggaran komisi c untuk melakukan perjalanan dinas atau kunjungan kerja.

Komisi c provsu memiliki peran dan fungsi tertentu dalam menyusun dana anggaran untuk kunjungan kerja atau kegiatan lainnya.

Berikut adalah Peran Komisi C dalam Penyusunan Dana Anggaran Kunjungan Kerja:

1. Pengkajian Proposal Kunjungan Kerja

Salah satu peran utama Komisi C adalah melakukan pengkajian terhadap proposal kunjungan kerja yang diajukan oleh anggota DPRD. Komisi ini bertugas memastikan bahwa kunjungan kerja yang diajukan sesuai dengan agenda tugas legislasi dan pengawasan yang relevan.

2. Evaluasi Anggaran

Komisi C bertanggung jawab untuk mengevaluasi rancangan anggaran yang diajukan untuk kunjungan kerja. Mereka harus memastikan bahwa anggaran yang diajukan mencakup semua biaya yang diperlukan untuk kelancaran kunjungan kerja tersebut, termasuk transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya.

3. Penyusunan Rancangan Anggaran

Komisi C harus secara aktif terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran kunjungan kerja. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti bagian keuangan DPRD, untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan dan dapat disetujui oleh pimpinan DPRD.

4. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran kunjungan kerja disetujui dan kunjungan kerja dilaksanakan, Komisi C memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan yang telah disetujui dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.

Adapun fungsi Komisi C dalam Penyusunan Dana Anggaran Kunjungan Kerja

1. Fungsi Legislasi

Komisi C berperan dalam fungsi legislasi dengan memastikan bahwa kunjungan kerja yang dianggarkan mendukung pelaksanaan tugas legislasi DPRD. Mereka harus memastikan bahwa kunjungan tersebut relevan dengan agenda legislatif yang sedang dibahas.

2. Fungsi Pengawasan

Komisi C juga memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam hal penggunaan dana kunjungan kerja. Mereka harus memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan dan bahwa hasil kunjungan kerja memberikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat.

3. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran Komisi C mencakup perencanaan, penyusunan, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kunjungan kerja. Mereka harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan mencukupi untuk melaksanakan kunjungan kerja dengan baik.

4. Fungsi Koordinasi

Komisi C juga berfungsi sebagai koordinator antara anggota DPRD yang mengajukan proposal kunjungan kerja dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengorganisasian kunjungan tersebut, termasuk penyedia jasa transportasi dan akomodasi.

Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja DPRD. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan transparan untuk memastikan bahwa anggaran kunjungan kerja digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan legislasi dan pengawasan. Dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut, Komisi C berkontribusi pada tugas pokok DPRD dalam mewakili dan melayani kepentingan masyarakat Sumatera Utara dengan baik

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dan tanggung jawab yang signifikan dalam merencanakan serta menyusun dana anggaran untuk kunjungan kerja. Tanpa proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang cermat, kunjungan kerja atau perjalanan dinas tidak akan mendapatkan persetujuan. Hal ini menandakan bahwa prosedur dalam penyusunan anggaran harus melalui persetujuan dari pihak berwenang yang berwenang mengeluarkan dana anggaran untuk kunjungan kerja.

Komisi C Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dan fungsi khusus dalam menyusun dana anggaran untuk kunjungan kerja atau kegiatan lainnya. Peran ini meliputi pengkajian proposal kunjungan kerja, evaluasi anggaran, penyusunan rancangan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Sementara itu, fungsi Komisi C mencakup fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi koordinasi dalam rangka memastikan kunjungan kerja dapat berjalan efisien dan sesuai dengan rencana..

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. Z., & Murdiana, E. (2020). *PERAN DAN FUNGSI KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN PENDIDIKAN ANAK DITENGAH PANDEMI COVID-19*. 02(01), 120–137.
- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- Gumilang, N. A. (2021). *Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>
- Hidayat, A. (2012). *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*. Statiskian. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- Kamal, M., Sagala, A., Lubis, A. W., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Analisis Prosedur Pencairan Dana Pada Saat Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Sumatera Utara. *Maret*, 2(1), 1–10.
- Salmaa. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya*. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Saputra, T. Y. (2019). Hambatan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Dalam Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(2), 73–76. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i2.117>
- Zaenudinsyah, F. (2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENUMPUKAN PENCAIRA DANA APBN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, Vol. 1 No., 67–83.